

**SDG 16
PEACE, JUSTICE,
AND STRONG
INSTITUTIONS**

SDG 16

PEACE, JUSTICE, AND STRONG INSTITUTIONS

“SDG 16 and 17 explore some of the underlying factors that are needed in order to ensure delivery of the other SDGs. Peace and Justice go hand in hand – and indeed are vital for equity between people and countries. Supporting this we need our institutions to be strong enough to maintain a focus on delivering the SDGs. This can range from individual justice – eradicating modern slavery and people trafficking – to ensuring that our countries have the evidence base needed to react appropriately to crises.”

(THE Impact Rankings)

University governance measures

Elected representation

ITS memiliki perwakilan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa ITS dalam sistem kampus tersebut. Terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang membantu mahasiswa untuk menyampaikan masalah atau ide kepada kampus untuk menjadi kampus yang lebih baik. Mahasiswa ITS juga terlibat sebagai perwakilan dalam Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan untuk Pemerintah, Masyarakat dan juga kampus itu sendiri. Pengangkatan sebagai anggota dalam organisasi pengatur diatur dalam peraturan disetiap organisasi itu sendiri.



Identify and engage with local stakeholders

ITS Surabaya merumuskan kebijakan untuk berperan aktif membangun kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Upaya ini juga terimplementasi pada dokumen Rencana Strategis Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selain itu, ITS juga berkolaborasi dengan pemerintah lokal di tingkat kelurahan untuk mengembangkan Smart Village atau Kampung Berkelanjutan.

University governance measures

Students' union

Sesuai regulasi rektor No. 4708/I2/KM/2009 mengenai serikat mahasiswa bahwa seluruh organisasi diawasi oleh ITS. Terdapat beberapa organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa. Pada tingkat program studi juga terdapat organisasi mahasiswa dengan sebutan Himpunan Mahasiswa.



Participatory bodies for stakeholder engagement

ITS Surabaya memiliki keberadaan badan partisipatif untuk mengenali dan melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk penduduk lokal, pemerintah daerah, swasta lokal, perwakilan masyarakat sipil setempat. Tanggung jawab ada di Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Direktorat ini merumuskan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang melibatkan tidak hanya dosen dan mahasiswa, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat.

University governance measures

University principles on corruption and bribery

ITS Surabaya memiliki prinsip dan komitmen tegas terhadap kejahatan terorganisir, korupsi, dan suap, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi dan juga Peraturan Rektor terkait. Komitmen ini juga terimplementasi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk pejabat di lingkungan ITS. Pada tahun 2020, ITS juga menyelenggarakan Webinar Anti Korupsi untuk menyuarakan prinsip ini.



Identify and engage with local stakeholders

ITS Surabaya merumuskan kebijakan untuk berperan aktif membangun kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Upaya ini juga terimplementasi pada dokumen Rencana Strategis Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selain itu, ITS juga berkolaborasi dengan pemerintah lokal di tingkat kelurahan untuk mengembangkan Smart Village atau Kampung Berkelanjutan.

Participatory bodies for stakeholder engagement

ITS Surabaya memiliki keberadaan badan partisipatif untuk mengenali dan melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk penduduk lokal, pemerintah daerah, swasta lokal, perwakilan masyarakat sipil setempat. Tanggung jawab ada di Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Direktorat ini merumuskan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang melibatkan tidak hanya dosen dan mahasiswa, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat.

University governance measures

Academic freedom policy

Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pada PP No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS Pasal 30 menjelaskan bahwa Kebebasan Akademik merupakan kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Publish financial data

Data finansial ITS Surabaya terekam pada Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen yang diterbitkan setiap akhir tahun. ITS Surabaya juga memiliki kompilasi informasi yang terintegrasi pada Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13.



University governance measures



Provide expert advice to government

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka, ITS Surabaya aktif berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui rekomendasi dan karya dari para ahli dari berbagai bidang. Peran aktif dosen ITS terimplementasi pada kebijakan-kebijakan di tingkat regional dan nasional, terutama di bidang kebencanaan dan perencanaan wilayah.